

Globethics Repository



Peran Perempuan Nasyyiatul ‘Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Perempuan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Silmi, Alin Fatharani
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-16 02:57:22
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/161530

Peran Perempuan Nasyiatul ‘Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Perempuan

Oleh ‘Alin Fatharani Silmi

1520010046

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Konsentrasi Pekerja Sosial

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Nasyiatul ‘Aisyiyah atau biasa dikenal dengan istilah Nasyiah, sebuah gerakan sosial keagamaan yang berada di bawah naungan salah satu organisasi masyarakat terbesar yaitu Muhammadiyah, yang dewasa ini memfokuskan ranah kajian mereka terhadap pemberdayaan perempuan terutama remaja putri yang memasuki masa-masa pubertas maupun terhadap perempuan dewasa. Angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin tahun semakin meningkat tentu menimbulkan sebuah kegelisahan bersama bagi rakyat Indonesia terutama kaum aktivis dan akademisi. Hal ini pula yang melatar belakangi Nasyiah untuk melakukan sebuah gerakan yang berfungsi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan. Dalam menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah, penulis menggunakan teori gerakan sosial (*social movement theory*) untuk mengeksplorasi bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah dalam memobilisasi perempuan Indonesia terutama yang berada di daerah Kebumen agar mampu bersama-sama memperjuangkan hak perempuan dan tidak diperlakukan semena-mena. Alasan penulis melakukan kajian di lembaga sosial yang berbasis keagamaan ialah dikarenakan apabila sebuah proses pemberdayaan yang memperjuangkan hak-hak kaum terdiskriminasi dalam hal ini terutama perempuan, tentu akan menjadi hal wajar apabila dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat umum seperti Rifka Annisa di Yogyakarta misalnya. Tetapi dewasa ini, angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat melahirkan banyak lembaga yang terfokus untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai korban dari tindak kekerasan maupun sosialisasi guna pencegahan angka kekerasan semakin meningkat. Penulis berargumen bahwa, sebagai lembaga yang terlahir lebih banyak berfokus pada keagamaan tentu proses pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh NA akan berbeda dengan lembaga yang memang memfokuskan terhadap pendampingan perempuan.

Kata Kunci: Nasyiatul ‘Aisyiyah, pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan.

PENDAHULUAN

Nasyiatul ‘Aisyiyah (Nasyiah) lahir di salah satu pusat peradaban Jawa yaitu Yogyakarta, yang merupakan daerah yang banyak dikenal sejak zaman dahulu bahkan hingga sekarang. Yogyakarta terkenal dengan sikap toleran, ramah penduduknya dan bahkan akomodatif terhadap adat istiadat Jawa yang masih dijunjung tinggi bahkan hingga saat ini. Yogyakarta juga menjadi sebuah saksi lahirnya gerakan Islam pembaharuan yang tidak lain merupakan ‘bapak’ dari Nasyiatul ‘Aisyiyah yaitu Muhammadiyah. Lahirnya Nasyiatul ‘Aisyiyah atau Nasyiah tentu tidak akan terlepas dari turut campur Muhammadiyah yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya.

Lahirnya Nasyiah didasari atas kekhawatiran KH Ahmad Dahlan terhadap kondisi perempuan pada saat itu, terutama para remaja putri. Mengingat kondisi di zaman itu dimana paham patriarkhi sangat nampak dan menjadikan perempuan memiliki akses yang sangat terbatas untuk menunjukkan eksistensi mereka di masyarakat. Oleh karena itu Ahmad Dahlan mencoba untuk mengajak para warga Muhammadiyah yang memiliki putri agar mengizinkan putrinya mengikuti kegiatan di luar rumah yang diprakarsai oleh istrinya yaitu Siti Walidah.

Keprihatinan terhadap perempuan sudah nampak bahkan sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, bentuk keprihatinan ini tertuang dengan banyak lahirnya lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Salah satu lembaga atau organisasi perempuan pertama yang pertama lahir dan memprakarsai lahirnya organisasi-organisasi lain yaitu GERWANI (gerakan wanita indonesia), Rukun Ibu Ampera Pembangunan, Dharma Pertiwi, ‘Aisyiyah dan salah satunya yaitu Nasyiah. Dengan banyaknya organisasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan perempuan agar terlepas dari perlakuan diskrimatif, harapannya tentu agar keberadaan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata, dan agar perempuan mampu mengeluarkan eksistensi mereka di ranah publik. Jika kita menelisik kondisi perempuan Indonesia saat ini, memang perempuan Indonesia kini sudah mulai bisa menunjukkan keahlian mereka di ranah publik tanpa adanya pro kontra dan bahkan jika bisa dibilang eksistensi perempuan sudah bisa disejajarkan

dengan laki-laki. Terbukti dengan banyaknya tenaga perempuan yang bisa menduduki kursi jabatan tertinggi di sebuah organisasi, juga dengan prestasi perempuan Indonesia yang bahkan diakui hingga di luar negeri. Seperti yang masih marak diperbincangkan yaitu Ariska Pertiwi seorang mahasiswi Kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Sumatra Utara yang mampu menjuarai Miss Grand Internasional di Amerika Serikat.

Sejalan dengan banyaknya prestasi yang mulai diukir oleh perempuan Indonesia, tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap angka kekerasan perempuan di Indonesia yang semakin tahun semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan hasil dari Komisi Nasional Perempuan pada awal tahun 2016 yang tertuang di dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sebesar 321.752, kasus yang bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama sejumlah 305.535 kasus dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus.¹ Dilihat dari jumlah kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi, ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa masyarakat Indonesia sudah ‘melek Gender’, masih jauh dari harapan.

Dengan melihat angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tergolong tinggi tentu menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai faktor apa yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi. Sementara pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai hal untuk mencoba meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan, salah satunya ialah dengan mendirikan Kementrian Perempuan dan Pemberdayaan, adanya Komisi Nasional HAM, Kementrian Sosial. Ditambah lagi langkah konkrit yang juga dilakukan dari sektor swasta, seperti organisasi-organisasi perempuan, Nasyiah salah satunya. Tetapi nampaknya itu juga belum bisa memiliki dampak signifikan terhadap pemberantasan kekerasan perempuan. Adanya berbagai organisasi pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan, tentu memiliki misi tertentu untuk mensejahterahkan kaum perempuan dan membuat mereka lebih berdaya dengan berbagai program yang

¹ www.komnasperempuan.go.id diunduh pada hari Senin, 17 oktober 2016

direncanakan. Ditambah lagi dengan bantuan dari sektor swasta, seperti halnya LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Masing-masing dari keduanya tentu memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan cita-cita organisasi mereka. Tetapi dewasa ini peranan negara dalam proses pemberdayaan khususnya perempuan masih terbilang tidak maksimal dan tidak mencapai akar dari permasalahan tersebut. Adapun berbagai program kerja yang dilaksanakan terkesan hanya nampak di permukaan tetapi tidak mencapai akar. Hal itu yang menjadikan berbagai organisasi swasta lebih banyak memainkan perannya di masyarakat. Dalam hal ini penulis mencoba memfokuskan mengenai langkah-langkah konkrit pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah khususnya di daerah Kebumen.

Tulisan berikut ini tidak bermaksud menyoal keabsahan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan pada umumnya maupun perdebatan mengenai andil dari sebuah negara, tetapi tulisan ini akan mencoba memfokuskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Nasyiah yang disebut dengan sebuah gerakan pemberdayaan terhadap perempuan khususnya remaja putri yang berada di daerah Kebumen. Tulisan ini mengkaji proses pemberdayaan perempuan oleh Nasyiah sebagai salah satu bentuk gerakan sosial (social movement theory).

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah yang dikhususkan dalam bentuk pemberdayaan terhadap perempuan, akan dilihat sebagai mobilisasi simbolik dari sebuah organisasi yang kemudian ini bisa dijadikan salah satu acuan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai organisasi perempuan yang sejak awal berdirinya Nasyiah memang bertujuan untuk mensejahterahkan kaum perempuan khususnya remaja putri, oleh karena itu tentu sejak dahulu program-programnya tidak terlepas dari langkah konkrit sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah Nasyiah sejak awal berdirinya di masa orde baru, dan keikutsertaannya dalam memberdayakan perempuan. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan khususnya terhadap remaja putri yang

dilakukan oleh Nasyiah di daerah Kebumen? Adapun untuk menjawab pertanyaan ini, tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Pembahasan pertama penulis akan mencoba membahas mengenai sejarah berbagai organisasi perempuan di Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru hingga saat ini. Pada pembahasan kedua penulis akan mengenalkan secara lebih rinci mengenai profil Nasyiatul ‘Aisyiyah atau Nasyiah. Pembahasan terakhir, penulis akan membahas mengenai langkah konkrit pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah terutama di daerah Kebumen. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan data tulis dari beberapa karya tulis mengenai Nasyiah dan juga data penelitian fenomenologis, dikarenakan penulis sempat beberapa kali mengikuti beberapa kegiatannya.

SEJARAH ORGANISASI PEREMPUAN

Dalam pembahasan ini penulis ingin sedikit menggambarkan mengenai bagaimana organisasi perempuan merespons perubahan keadaan sejak munculnya rezim orde baru yang tentunya menggambarkan mengenai Nasyiah yang juga memiliki andil di dalamnya dan membingkainya dalam konteks pemberdayaan terutama perempuan. Di dalam buku dari Ibu Siti Syamsiyatun yang membahas secara rinci mengenai Nasyiah, beliau juga menjelaskan mengenai berbagai organisasi perempuan ketika masa orde baru.

Di dalam salah satu babnya, beliau menggambarkan mengenai kebijakan negara tentang perempuan (di ranah sosial-ekonomi) yang sangat mempengaruhi kehidupan warga muslim pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Pengaruh-pengaruh itu dapat ditemukan dalam sejumlah aspek, cara, serta berbagai waktu yang berbeda dalam suasana dan intensitas yang berbeda pula.²

Sejarah mencatat dan seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa awal orde baru keadaan sosial politik mengalami sebuah dinamika yang cukup kompleks dan penuh konflik. Hubungan yang penuh konflik semacam itu pada gilirannya memengaruhi kehidupan dan perjuangan warga muslim pada umumnya. Beberapa bulan setelah kudeta berdarah pada tanggal 30 September 1965 yang gagal ketika

² Siti syamsiyatun, *Pergolakan Putri Islam*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 45.

ABRI di bawah komando Suharto mengambil langkah untuk melawan komunisme (atau yang diduga komunis) dapat dianggap sebagai masa hubungan baik antara pemerintah orde baru Indonesia, yang diwakili oleh Suharto dan militer, dengan pergerakan muslim. Di titik ini mereka bersatu dalam melaksanakan pembantaian di titik-titik tertentu dan menghapuskan jejak-jejak komunisme dari Indonesia meski adanya perbedaan alasan dan tujuan.³ Setelah Suharto menjadi presiden, ia melarang pemimpin Masyumi untuk memimpin partai politik Islam yang baru dibentuk, yaitu Parmusi (Partai Muslim), menyingkirkan dan melemahkan peranan dan pengaruh para pemimpin NU dalam Kementrian Agama, dan seringkali (kebanyakan terjadi pada 1980-an), menuduh para aktivis muslim sebagai pihak yang seversif dan memenjarakan mereka tanpa proses pengadilan. Singkatnya, rezim orde baru yang sangat ingin mendorong keharmonisan, kestabilan dan keamanan bekerja keras dalam membendung penyebaran gagasan politik Islam, karena banyak politisi Muslim telah dengan efektifnya menggunakan Islam sebagai kendaraan ideologis untuk menentang pemerintah.

Di awal pemerintahannya Suharto mengambil satu langkah yang tergolong ekstrim terhadap organisasi perempuan, yaitu dengan membubarkan organisasi perempuan yang paling militan pada saat itu yang juga berafiliasi dengan PKI yaitu Gerwani. Setelah menghancurkan Gerwani, rezim orde baru secara sistematis menciptakan label yang bertujuan untuk mencap para aktivis perempuan sebagai ‘perempuan yang tidak bermoral dan berkelakuan tidak sesuai dengan kodrat perempuan’. Namun di waktu yang bersamaan, pemerintah juga berupaya untuk ‘menjinakkan’ perempuan Indonesia dengan memaksakan citra baru mengenai perempuan yang ideal di mata bangsa Indonesia yaitu seorang ibu yang (sudah) ‘dijinakkan’ dan bergantung kepada suaminya serta selalu siap untuk melayaninya, keluarga dan negaranya. Dalam rangka menyebarkan ideologi ini, pemerintah mendorong dan mensponsori pembentukan organisasi para istri. Pada 1938, pemerintah memprakarsai pendirian Rukun Ibu Ampere Pembangunan

³ Siti Syamsiyatun, *Pergolakan Putri Islam*, hlm. 47

(RIA Pembangunan), sebuah organisasi bagi para istri menteri, sekretaris jendral dan direktur jendral di berbagai kementerian yang didirikan oleh negara. Diikuti dengan pendirian Dharma Wanita untuk para istri dari para suami yang bekerja sebagai pegawai negeri, Dharma Pertiwi bagi para istri dari laki-laki yang bekerja sebagai perwira, militer, polisi. Serta PKK bagi semua perempuan awam.⁴

Untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak dalam orde baru. Dalam bidang organisasi untuk menunjang program peningkatan perempuan Indonesia dalam pembangunan, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi perempuan, salah satunya ialah diprakarsai oleh perkumpulan para istri pegawai negeri dikelompokkan dalam Dharma Perempuan, para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi, para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan istri pegawai negeri atau istri ABRI diciptakan organisasi PKK yang secara eksplisit dinyatakan oleh GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan Indonesia dalam pembangunan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan perempuan Indonesia dalam pembangunan tidak hanya berhenti dalam pengelompokkan perempuan Indonesia dalam organisasi perempuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun pemerintah juga telah menentukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan melalui apa yang kita kenal dengan *Panca Tugas Perempuan*.⁵

Setelah proses pembangunan yang besar dalam tataran sekolah dasar, program pendidikan wajib 9th pun diluncurkan. Anak-anak perempuan Indonesia sangat diuntungkan oleh kebijakan ini. Tingkat literasi di kalangan orang dewasa meningkat dari 80,5% pada 1990an ke 82% pada tahun 2000. Selain itu, kini banyak perempuan yang mampu mengenyam bangku pendidikan di sekolah resmi di semua jenjang. Karenanya beberapa tahun kemudian mereka memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk dapat bersaing dengan laki-laki dalam

⁴ Siti syamsiyatun,....., hlm. 49-50

hal pencarian kerja di luar rumah. Meskipun presentasi perempuan yang bersekolah telah meningkat, namun jumlahnya selalu di bawah laki-laki. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi, maka perubahan-perubahan dalam hal ketenagakerjaan bagi perempuan pun terjadi. Tujuan dan maksud pendidikan bagi perempuan telah berubah dengan cukup signifikan. Sebelum tahun 1980-an, salah satu tujuan negara yang paling nyata dalam mendorong perempuan bersekolah adalah guna mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu yang paripurna. Akan tetapi, sejak saat itu kebanyakan perempuan terdidik mengatakan bahwa maksud mereka mengambil pendidikan yang lebih tinggi adalah untuk membangun harga diri dan menjadi lebih kompetitif di bursa kerja, selain atau ketimbang menjadi istri dan ibu yang baik. Sebagai sebuah organisasi perempuan, Nasyiah layaknya organisasi massa sosial-keagamaan lainnya seperti 'Aisyiyah, Muslimat NU dan Fatayat NU, menghadapi dilema mengenai bagaimana mengelola organisasi pada titik ini. Pada tataran teoritis dan ideal semua aktivitas yang dijalankan oleh Nasyiah harus didorong oleh motif ilahiah, yaitu aktivitas yang bernuansa ibadah dan amal, dan bukan berlandaskan pencarian keuntungan duniawi. Akan tetapi, tuntutan masyarakat atas pendekatan profesional terhadap pengelolaan organisasi dan kerja-kerja terampil yang dilakukan oleh organisasi (yaitu di ranah-ranah seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, penerbitan, dan penelitian) semakin meningkat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selama sejarah awal orde baru, kelompok-kelompok perempuan paling maju adalah organisasi istri dan PKK. Tentunya selain organisasi perempuan yang telah lama berdiri seperti 'Aisyiyah, Nasyiah, Muslimat dan Fatayat. Meskipun organisasi-organisasi perempuan tersebut khususnya Dharma Wanita dan PKK dikritik oleh banyak penulis karena mereka dianggap tidak militan dengan demikian menurunkan martabat perjuangan untuk pemberdayaan perempuan. Kendati kenyataannya mereka masih berhasil memperjuangkan beberapa kepentingan perempuan dalam batasan dan kemampuan mereka masing-masing. Kebanyakan anggota Dharma Wanita hanya memfokuskan minat mereka kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh para istri pegawai negeri sipil, seperti

membantu suami mereka untuk berhasil dalam karirnya, memastikan agar kenaikan pangkat suami mereka tidak terhalang dan berkomunikasi dengan istri atasan sang suami atau membagi ketrampilan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan.⁶

Dilihat dari sejarah adanya organisasi perempuan, belum ada bentuk pemberdayaan yang mampu menghasilkan dampak yang signifikan dalam pengentasan masalah-masalah perempuan terutama organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Salah satu langkah yang cukup menarik perhatian ialah dengan program Keluarga Berencana yang diprakarsai oleh pemerintah yang kemudian juga diadopsi oleh organisasi massa sosial keagamaan seperti 'Aisyiyah, Nasyiah, dan Muslimat. Program ini dirasa menjadi salah satu program yang mampu menjadi langkah konkrit dari proses pemberdayaan perempuan meskipun hanya dari sektor keluarga berencana. Dari Fatayat sendiri, dengan mengadopsi program tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sebuah lembaga baru yang disebut Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) yang memfokuskan ranah gerakannya terhadap wacana gender yang bertempat di Yogyakarta. Langkah serupa juga dilakukan oleh Nasyiah dengan membangun sebuah lembaga 'satelit' yang diberi nama Yayasan Padi Surya pada tahun 1999 untuk memfasilitasi keterlibatannya dengan pihak-pihak asing dan bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Pada akhirnya, dalam mempelajari sejarah organisasi massa perempuan yang bergerak dalam ranah perempuan terutama dalam hal ini ialah Nasyiah, sebagai pergerakan Islam maupun juga pergerakan perempuan di Indonesia kita tidak bisa lepas dari campur tangan negara dan apa yang telah dihadirkan oleh kebijakan sosial, ekonomi dan politik kepada perempuan. Akan tetapi, bukan berarti faktor kekuatan internal dan perkembangan organisasi itu dapat disingkirkan. Selain itu, kondisi sebenarnya dari hubungan antara negara dengan pergerakan Islam terbukti

⁶ *Ibid*,hlm.55-57

mempengaruhi orientasi dan program-program pergerakan perempuan Muslim, termasuk Nasyiah.⁷

SEKILAS TENTANG NASYIATUL ‘AISYIYAH

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk menelusuri sejarah perkembangan Nasyiah yang ditinjau dari perspektif pemberdayaan perempuan dan sedikit menyinggung mengenai perspektif gender. Karena keterlibatan Nasyiah di masa lalu tidak bisa dilepaskan dari keterikatannya dengan permasalahan mengenai gender.

Sejarah lahirnya Nasyiah tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai salah satu organisasi yang memprakarsai lahirnya Nasyiah sebagai gerakan pembaruan putri Islam. Di satu sisi, pembentukan Nasyiah dapat dipahami sebagai salah satu hasil dari pembaruan Islam dan perubahan sosial dalam ranah status perempuan sebagaimana yang dulu diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan dan istrinya yaitu Ibu Siti Walidah, melalui Muhammadiyah di masa-masa awal perjuangannya. Sebelum mencapai kondisi sekarang ini, Nasyiah berevolusi dari sebuah kelompok sederhana yang terdiri dari beberapa anak perempuan Muslim dan didirikan pada 1919 yang disebut Siswa Praya Wanita di Kauman Yogyakarta. Para anak perempuan itu merupakan siswi dai Standard School Muhammadiyah, yang setara dengan sekolah dasar 5th, lembaga pendidikan pertama yang dibangun oleh Muhammadiyah pada 1918. Pembentukan SPW ini didorong oleh Bapak Somodirjo, yang kemudian menjadi guru di sekolah itu sekaligus seorang anggota pimpinan cabang Muhammadiyah terkemuka. Aktivitas SPW biasanya dilaksanakan di luar jam sekolah, biasanya di siang atau sore hari. SPW dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi para siswi untuk mempraktikkan pengetahuan teoritis yang mereka dapatkan di kelas pagi seperti berwudhu, shalat berjamaah, dan berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, serta menggalakkan solidaritas di kalangan para siswi yang pada saat itu masih minoritas. Kemudian aktivitas siang hari dilengkapi juga dengan

⁷ *Ibid*,hlm. 65-66.

pembekalan ketrampilan hidup dan praktik yang dianggap penting bagi perempuan Muslim, seperti pengelolaan rumah tangga, menjahit, memasak dan tabligh.⁸ Pada awal kelahirannya kegiatan yang dilakukan oleh Nasyiah masih tergolong penguatan internal kepada para kader. Hal ini sesuai dengan kondisi sosial politik pada saat itu yang masih menjadikan perempuan terkungkung dalam stigma bahwa keberadaan perempuan hanya di *dapur sumur dan kasur*. Namun berkat keprihatinan dan kepedulian Ahmad Dahlan beserta istri, ditambah lagi dengan pemikiran dari para orang tua yang mau mengizinkan putrinya mengikuti kegiatan di luar jam sekolah dan di luar dari kebiasaan masyarakat pada saat itu.

Selain mengakui status merdeka perempuan dalam bidang keagamaan, Ahmad Dahlan dan istrinya juga dikenal dengan usaha mereka yang tak kenal lelah dalam mengangkat hak asasi perempuan agar perempuan dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seiring dengan berjalanya waktu, pengakuan sosial terhadap dan terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan mulai berubah. Perempuan Nasyiah semakin percaya diri sehingga mereka berani memperluas jangkauan aktivitas mereka. Para perempuan Nasyiah itu mendirikan banyak kelompok pengajian di daerah Yogyakarta dan juga di luar Yogyakarta dan mulai memberikan khotbah atau ceramah di tempat tersebut. Bentuk sumber pembelajaran baru untuk perempuan ini berkembang dengan pesat. Sejak masa itu, pengajian dan khotbah tidak lagi hanya menjadi ranah kekuasaan laki-laki Muslim. Dalam Kongres Muhammadiyah ke 27 yang diadakan di Malang, Jawa Timur pada tahun 1938, yang dihadiri pula oleh 'Aisyiyah dan Nasyiah, diberitakan bahwa Muhammadiyah memiliki 5.516 mubaligh dan 2.114 mubalighot dari 'Aisyiyah dan Nasyiah. Aktivitas Nasyiah lain yang terkenal pada 1920-an dan 1930-an adalah kelompok paduan suara dan marching band yang dipertunjukkan dengan kelompok bermusik di jalan-jalan di Yogyakarta. Meskipun menurut sejarah hal itu mendapat pertentangan dari berbagai pemuka Muhammadiyah karena menganggap hal itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh perempuan pada zaman jahiliyyah. Tetapi Nasyiah menganggap bahwa hal itu sebagai perwujudan

⁸ *Ibid*,lm, 68-70

lain dari konsep dakwah mereka. Selain itu, pada 1938 Nasyiah mendirikan sebuah perpustakaan kecil yang disebut Taman 'Aisyiyah, yang di sana semua anak perempuan dapat mengakses buku dan juga memperoleh pelatihan penulisan dan mengarang. Di tahun yang sama, Nasyiah juga menetapkan simbol organisasi yaitu dengan bentuk batang padi dan juga menetapkan lagu Mats Nasyiah yang dikarang oleh Bapak Akhyar Anies yang berjudul 'Nasyiah Bersimbol Padi'.⁹ Dewasa ini, ranah gerak Nasyiah lebih banyak dikenal di dalam sektor pendidikan. Hal ini sesuai dengan banyaknya kader Nasyiah yang menjadi seorang guru, dosen maupun tenaga pengejar lainnya. Ternyata hal itu tidak bisa terlepas dari awal mula kelahirannya yang memang memfokuskan pada ranah pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dicapai oleh para pimpinan Nasyiah semakin tahun semakin meningkat dari generasi ke generasi. Generasi pertama memimpin Nasyiah pada tahun 1920-an hanyalah lulusan dari sekolah dasar 5 tahun. Satu dekade kemudian yaitu pada tahun 1930-an lebih banyak pimpinan Nasyiah yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, beberapa dari mereka ialah lulusan dari Schakel School Muhammadiyah dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah. Dalam hal akses pendidikan, generasi perempuan pada tahun 1940-an dan awal 1950-an memiliki nasib yang kurang beruntung. Hal itu disebabkan karena selama perang pasifik dan perang kemerdekaan banyak sekolah-sekolah ditutup. Termasuk Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah, sekolah yang paling produktif dalam menghasilkan kader-kader Nasyiah. Mulai akhir 1950-an, jumlah perempuan Nasyiah yang bersekolah di universitas semakin meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan program pembangunan nasional yang dilancarkan oleh pemerintah. Meskipun yang ditekankan oleh Ahmad Dahlan bukanlah tingkatan pendidikan formal, tetapi kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman akan tugas-tugas dan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia. Namun asumsi yang

⁹ *Ibid*,hlm. 78-80

umumnya melekat di masyarakat ialah semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang ia dapatkan.¹⁰

Pada Mukhtar Nasyiah ke-10 yang dilaksanakan di Surakarta pada 8-11 Desember 2004 dan dihadiri oleh berbagai perwakilannya dari seluruh provinsi di Indonesia, Nasyiah kembali menegaskan bahwa tujuan organisasi yaitu sebagai 'organisasi Islam putri Islam'. Dalam Mukhtar itu juga ditegaskan bahwa Nasyiah ialah kader Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam mengemban tugas sosial keagamaannya, kini Nasyiah mengemban lima departemen, yaitu Departemen Dakwah, Departemen Kader, Departemen Sosial Ekonomi, Departemen Informasi dan Dokumentasi dan Departemen Seni dan Kebudayaan. Pada dasarnya yang dinamakan sebagai anggota dari Nasyiah ialah perempuan Muslim yang berusia 17-40 tahun dan sepaham dengan tujuan serta tunduk kepada aturan-aturan Nasyiah diperbolehkan bergabung dengan Nasyiah. Pada pertengahan 2000an Nasyiah mengklaim bahwa mereka memiliki kader sejumlah 4 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nasyiah membagi kekuasaan menjadi lima tingkatan, mulai dari tingkatan pedusunan (ranting), hingga nasional (pusat). Dalam sebuah laporan yang disajikan pada Mukhtar ke 9 di Jakarta, Juli 2000, Nasyiah mengklaim memiliki perwakilan di 26 provinsi, 229 kotamadya, 697 kabupaten, dan 2091 dusun. Untuk mengelola jaringan nasional yang tersebar luas di seluruh Indonesia itu, Nasyiah memiliki 46.000 perempuan yang sekarang menjabat sebagai pimpinan di masing-masing tingkat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Nasyiah pada tahun 1995 menemukan bahwa 76% dari semua anggota yang menjabat sebagai pemimpin Nasyiah itu merupakan sarjana dan 87% dari perempuan itu bekerja di sektor pendidikan sebagai tenaga pengajar, di semua jenjang pendidikan dan juga sebagai peneliti.¹¹

¹⁰ Ibid,.....hlm.93-94

¹¹ Ibid,.....hlm.68-69.

NASYIATUL 'AISYIAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: PASMINA

Sejak awal kemunculannya, Nasyiah memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan yang pada saat itu mengalami keterbatasan dalam menunjukkan eksistensi mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, tentu permasalahan yang dihadapi berbeda-beda, begitu juga dengan pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah sebagai langkah konkrit dalam melakukan pemberdayaan. Di Indonesia pada khususnya, permasalahan mengenai perempuan selalu saja menjadi masalah yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan dikaji lebih dalam dan menemukan berbagai langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seperti yang sudah penulis bahas pada awal pembahasan penulisan yaitu mengenai angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari semakin bertambah, ini menjadi PR besar bagi pemerintah dan juga organisasi swasta yang memfokuskan ranah geraknya pada perempuan salah satunya yaitu Nasyiah.

Setiap lembaga ataupun organisasi tentu memiliki cara tersendiri dalam menanggulangi masalah perempuan ini. Nasyiah memiliki tiga pilar kesetiaan yang digunakan sebagai prinsip dalam menjalankan misinya, yaitu kesetiaan kepada Islam, kepentingan perempuan muda dan nasionalisme Indonesia. Adapun ketiga pilar kesetiaan tersebut diimplementasikan melalui pendirian empat departemen, yaitu departemen kader, departemen dakwah, departemen informasi dan dokumentasi, dan departemen keputrian dan kesejahteraan keluarga. Dari berbagai departemen tersebut, nampak jelas bahwa misi dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah bersifat holistik untuk ranah perempuan, dengan melakukan pemberdayaan yang bisa berbentuk sosialisasi maupun penyuluhan yang memfokuskan kepada remaja putri dengan adanya departemen keputrian dan kesejahteraan keluarga. Hal ini tentu tidak terlepas dari tujuan Nasyiah yaitu agar para kader Nasyiah yang tergolong perempuan muda usia 17-40 tahun bisa menjadi remaja putri Islam yang produktif, melakukan hal positif dan mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik bagi keluarga.

Proses pemberdayaan yang dilakukan sejak awal lahirnya Nasyiah salah satunya ialah dengan mengajarkan kepada para remaja mengenai cara menjahit, memasak, hingga mengurus jenazah. Setelah itu, di dekade setelahnya bentuk pemberdayaan yang dilakukan lebih mengutamakan kepada sektor pendidikan. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya anggota Nasyiah yang menjadi tenaga pengajar. Adapun itu dilakukan bukan tanpa tujuan, pendidikan dirasa menjadi salah satu faktor yang terpenting dalam proses memberdayakan perempuan pada saat itu bahkan hingga saat ini. Pendidikan bukan hanya mampu menyelamatkan perempuan Indonesia dari kebodohan semata, tetapi dengan pendidikan diharapkan anggota Nasyiah mampu menjadi manusia terdidik seperti yang dituliskan di dalam syair lagu dari Masr Nasyiah. Memasuki dekade terakhir ini pada tahun 2014 tepatnya ketika Milad Nasyiah, Nasyiah meluncurkan salah satu program terbaru yaitu Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiatul ‘Aisyiyah atau yang lebih dikenal dengan PASHMINA. Kegiatan ini dicanangkan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah berdasarkan kegelisahan yang dirasakan dan yang terjadi dewasa ini terhadap para remaja putri Indonesia. Seperti permasalahan kekerasan seksual, pornografi, human trafficking, dan masih banyak lainnya. Sementara remaja merupakan aset dari suatu bangsa yang akan meneruskan estafet perjuangan para generasi sebelumnya, lantas bagaimana nasib bangsa ini jika generasi muda lebih asyik untuk bermain game, bermain smartphone mereka dari pada mengikuti hal-hal yang positif seperti masuk organisasi? Hal inilah yang kemudian memunculkan lahirnya kegiatan Pashmina tersebut.

Pashmina memang masih tergolong kegiatan baru yang diluncurkan oleh PPNA Indonesia, yang mengharapakan bahwa kegiatan ini terjadi menyeluruh di seluruh lapisan Nasyiah. Meskipun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak daerah yang bahkan belum melaksanakan kegiatan tersebut karena keterbatasan, dan hal lainnya. Kebumen salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan Pashmina tersebut dan sudah mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Wilayah Jawa Tengah karena sampai sekarang masih konsisten melakukan proses pemberdayaan ini. Adapun pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar “daya” kemudian

menjadi “berdaya” yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.¹² Atas daya-daya yang ada pada diri manusia, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk me-mampu-kan, menguatkan daya-daya yang ada pada diri manusia, atau pada formulasi berbeda namun esensinya sama merubah dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya. Yakni suatu kondisi dimana seseorang mempunyai kekuatan dan kemampuan baik secara intelektual, spiritual, ketrampilan ataupun material sehingga mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya.

Pemberdayaan perempuan berarti upaya pemberian kekuatan dan kemampuan bahkan kekuasaan terhadap potensi yang dimiliki perempuan agar dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya tetapi menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan upaya pemberdayaan.¹³

Pemberdayaan perempuan terkait juga dengan kemampuan perempuan yaitu upaya untuk memberikan kemampuan kepada individu agar mengendalikan, mengatur dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Pemberdayaan dengan konsep pemampuan lebih memfokuskan pada kontrol internal kaum perempuan bukan menentang kaum pria yang selama ini mendominasi, namun meluruskan konsep yang diterjemahkan dengan pola hubungan yang menempatkan perempuan tidak berdaya.¹⁴

Dalam operasionalisasi pemberdayaan perempuan ada dua hal yang perlu dilakukan.¹⁵ *Pertama*, dalam proses pemberdayaan hendaknya menekankan proses pendistribusian kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kepada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya. Dalam mewujudkan hal ini perlu merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan yang

¹² Peter Salim dan Yeni Salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer*, (Jakarta: Modern english pres, 1991), hlm. 323.

¹³ Sebagaimana diungkapkan oleh Pranaka bahwa pemberdayaan memungkinkan seseorang pribadi mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dan mengarah pada penyempurnaan fitrahnya sebagai manusia. Dalam majalah BASIS no. 03/04/th. 46, maret-April 1997. Dalam Skripsi

¹⁴ E. Kristi Poewardari, *perempuan dan pemberdayaan*, (jakarta: obor, 1997), hlm. 361-362

¹⁵ DEPAG RI, HLM. 122

selama ini telah mendistribusikan komponen diatas secara tidak seimbang (inquality), yang didukung dengan aset material. Langkah tersebut akan mempengaruhi kebutuhan strategis kaum perempuan untuk melakukan *bergening position*. Untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut dibutuhkan aset material atau kebutuhan praktis perempuan seperti meningkatkan pendapatan ekonomi. *Kedua*, dengan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Dalam pelaksanaannya yang masih tergolong baru, pashmina di daerah Kebumen belum bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai harapan karena semua masih dalam proses. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Ahad pagi di minggu kedua, pashmina bertempat di alun-alun Kebumen yang menjadi sentral dari masyarakat Kebumen. Terlebih setiap hari Ahad pagi ada Car Free Day atau CFD yang menjadikan alun-alun menjadi salah satu tujuan dari masyarakat Kebumen untuk menghabiskan hari minggunya. Kebanyakan masyarakat yang hadir di alun-alun setiap minggunya merupakan remaja belasan tahun yang sedang mengalami masa pubertas dan inilah memang yang menjadi tujuan dan objek dari kegiatan pashmina tersebut. Adapun bentuk kegiatannya dari pihak Nasyiah ialah kami menyediakan pos untuk konsultasi yang berbeda-beda yang kurang lebih setiap minggunya terbagi menjadi 5 pos, seperti pos untuk konsultasi masalah kesehatan reproduksi, pos untuk konsultasi psikologis, pos mengenai media dan teknik elketronik, pos untuk remaja pra nikah, dan pos untuk konsultasi pernikahan bagi ibu-ibu mudah yang baru menikah.

Masing-masing dari post tersebut terdapat satu konsultan yang mereka tidak lain ialah anggota dari Nasyiah yang sudah dibekali ilmu mengenai masing-masing dari pos tersebut. Jadi setiap minggunya konselor yang menjaga pos itu bisa berubah-ubah, karena tidak semua anggota Nasyiah bisa hadir dalam kegiatan pashmina tersebut. Pashmina yang diadakan di sudut alun-alun Kebumen ini tidak selamanya hanya terpusat di alun-alun, kegiatan pashmina ini pernah juga diadakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang menginginkan untuk

mengadakan semacam pelatihan maupun konseling kepada para siswa-siswanya. Seperti yang pernah dilakukan di SMP dan SMA Muhammadiyah di Sempor, Gombong, Karanganyar dan terakhir 16 Oktober lalu di daerah Kutowinangun.¹⁶

Proses pemberdayaan ini tentu bukan tanpa masalah dan tanpa halangan, karena sebagai organisasi yang termasuk minoritas di daerah Kebumen, langkah Nasyiah ini masih tergolong langkah yang jarang ada di Kebumen. Sehingga pada awal kegiatan ini dilakukan, para remaja putrinya masih jarang yang hendak berkonsultasi karena malu dan enggan. Tetapi hingga bulan ini, kegiatan pashmina sudah cukup mendapatkan respon positif di mata remaja muslim Kebumen. Meskipun masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Nasyiah dalam melaksanakan program ini, dikarenakan pashmina itu sendiri baru berjalan satu tahun di Kebumen.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas, dapat penulis simpulkan beberapa hal dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal tulisan ini. *Pertama*, ialah mengenai peran serta Nasyiah dalam proses pemberdayaan perempuan sejak zaman orde baru hingga saat ini. Kelahiran Nasyiah tentu tidak bisa terlepas dari peran serta Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun kelahiran Nasyiah sama sekali tidak ada peran serta dari negara dan murni dari lembaga swasta, tetapi kiprah Nasyiah dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kebodohan dan keterbelakangan yang dialami oleh perempuan tidak bisa dilupakan. Nasyiah termasuk salah satu organisasi massa sosial keagamaan pertama yang memprakarsai lahirnya berbagai organisasi perempuan lainnya. Namun dengan menjunjung tinggi tiga pilar kesetiaan Nasyiah yaitu kesetiaan kepada Islam, kepentingan perempuan muda dan nasionalisme Indonesia, hal ini membuktikan bahwa walau bagaimanapun proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah tentu tidak akan terlepas dari tujuan untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan perempuan Indonesia. *Kedua*, yaitu mengenai program Pashmina atau Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiatul 'Aisyiyah yang

¹⁶ Wawancara dengan ibu Navi Agustina, mantan ketua PDNA Kebumen

merupakan agenda yang diwajibkan kepada seluruh anggota Nasyiah di seluruh Indonesia, yang dimandatkan langsung oleh Pimpinan Pusat Nasyiah dan sudah mulai dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah di Kebumen yang dilaksanakan setiap minggu kedua di hari Minggu yang bertempat di alum-alun Kebumen.

Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Terutama tinjauan pustaka mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Nasyiah, dikarenakan masih sangat minim dari berbagai peneliti yang melakukan penelitian mengenai Pashmina mengingat ini adalah program baru yang ditawarkan oleh PPNA Indonesia.

Sebuah proses pemberdayaan terutama pemberdayaan perempuan yang dewasa ini menjadi pusat perhatian dari banyak pihak tentu kita tidak bisa melaksanakannya dengan sembarang saja. Tetapi ada berbagai tata cara yang harus dilakukan dan menjadi bagian penting dari proses sebuah pemberdayaan. Dalam operasionalisasi pemberdayaan perempuan ada dua hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, dalam proses pemberdayaan hendaknya menekankan proses pendistribusian kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kepada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya. Dalam mewujudkan hal ini perlu merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan yang selama ini telah mendistribusikan komponen diatas secara tidak seimbang (*inquality*), yang didukung dengan aset material. Langkah tersebut akan mempengaruhi kebutuhan strategis kaum perempuan untuk melakukan *bergening position*. Untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut dibutuhkan aset material atau kebutuhan praktis perempuan seperti meningkatkan pendapatan ekonomi. *Kedua*, dengan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan mengacu pada salah satu prinsip pemberdayaan yang penulis tawarkan, semoga proses pemberdayaan yang tentu masih jauh dari sempurna mampu merefleksikan diri dan anggotanya terutama Nasyiah agar mampu belajar dan terus memperbaiki

proses pemberdayaan yang dilakukan agar menjadi semakin baik dan semakin diminati oleh remaja Muslim di Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti syamsiyatun, *Pergolakan Putri Islam*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016)
- Peter Salim dan Yeni Salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer*, (Jakarta: Modern english pres, 1991)
- E. Kristi Poewandari, *perempuan dan pemberdayaan*, (jakarta: obor, 1997)
- www.komnasperempuan.go.id diunduh pada hari Senin, 17 oktober 2016
- Hasil wawancara dengan mantan ketua PDNA Kebumen Ibu Navi Agustina